

## LASEM: NAPAK TILAS PERDAGANGAN OPIUM NUSANTARA

**Aditya Ikyan Haikal**

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

[haikaldalopez@students.unnes.ac.id](mailto:haikaldalopez@students.unnes.ac.id)

### ABSTRACT

*Opium is a plant that is included in class I narcotics, this plant is a type of annual plant and cannot be cultivated in other areas except in the mountains of the subtropics. During the colonial era, the opium plants in the Dutch East Indies came from several regions, including India, Persia, Turkey and Singapore. In fact, during the Dutch colonial era, opium was not the only imported commodity. Judging from the previous records it is stated that imported goods were transported during the Dutch East Indies colonial administration by using ships with the final route to ports in various regions, including cloth, oil, iron or other goods made from iron. , weapons, candles, liquor and various other items including opium. The opium trade in the Java region began to spread since a binding agreement was obtained between King Amangkurat II and the Dutch, who at that time was led by the VOC, to monopolize the opium trade to the Mataram territory which covered almost the entire island of Java at that time. From what was originally only the aristocratic class, over time it has turned into people of all groups becoming consumers of these goods. The Lasem people were no exception, they were famous for distributing opium, even at that time in the black market trading model. They even earned the nickname as the "dark funnel" of Java as a form of their expertise in distributing these goods.*

**Keywords:** *Opium; Colonial; Trade; Chinese; Lasem*

### PENDAHULUAN

Opium atau dalam bahasa lain disebut sebagai candu, dikenal sebagai sebuah bahan yang digolongkan sebagai sebuah narkotika yang didapat dari tanaman *papaver somniferum*. Opium ini didapatkan dari getah buah yang kemudian dikeringkan sehingga berwarna coklat agak kekuningan. Seperti yang kita tahu bahwa opium tergolong sebagai narkotika, dengan zat yang terdapat didalamnya adalah *morfine* yang jika dikonsumsi dapat memberikan efek kesenangan berlebih. Selain dapat memberi efek senang, morfin pada dasarnya merupakan

obat medis yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit seorang pasien.<sup>1</sup> Hal inilah yang kemudian mendasari pengetahuan medis pada masa lalu untuk menjadikan opium sebagai alternatif pengobatan medis.

Tanaman yang masuk kedalam narkotika golongan 1 ini merupakan jenis tanaman semusim dan tidak bisa dibudidayakan di wilayah lainnya kecuali di pegunungan kawasan subtropis. Sehingga pada masa penjajahan kolonial di Indonesia, opium menjadi komoditas impor dari kawasan eropa ke Nusantara. Keberadaan opium pada awalnya dibawa oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda melalui pedagang swasta dari Belanda di Levant, yakni saat diadakan lelang di daerah Kalkuta untuk mendapatkannya dari agen-agen di British Singapore. Kemudian dibawa ke tanah Jawa oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk dibawa ke gudang-gudang tempat penyimpanan di daerah Batavia, Semarang, dan Surabaya (Nugroho, 2018).<sup>2</sup>

Meskipun menurut beberapa sumber dikatakan opium dibawa ke Nusantara oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, namun nyatanya perdagangan opium di Nusantara telah terjadi terlebih dahulu ketika pedagang Arab dan Timur Tengah lainnya berada di Indonesia. Barulah ketika kolonialisme dan imperialisme berkembang di Indonesia perdagangan opium diambil alih pedagang Eropa (Trianasari, 2020).<sup>3</sup> Tak hanya Belanda, sebab Bangsa Portugis pun juga saat menguasai kawasan Asia menjadikan opium sebagai alat tukar untuk sutra dari Cina, yang digunakan setelah itu sebagai alat untuk menguasai perdagangan di Cina. Hal ini yang ditiru oleh pemerintah Kolonial Belanda melalui perusahaan dagang miliknya yang kita ketahui bersama yaitu VOC, sebagai alat untuk menguasai perdagangan di Nusantara khususnya di daerah Jawa.

Sesuai dengan garis waktu kedatangan orang-orang Belanda yakni pada abad ke-17, saat itu pula mulai terjadi transisi kekuasaan dalam hal ekonomi yang menggusur orang-orang Arab yang menjadi pemasok candu di Jawa. Kemudian mereka bersaing dengan

---

<sup>1</sup> A. Annisa, P. Heri & A. Subarnas. "MORFIN : PENGGUNAAN KLINIS DAN ASPEK-ASPEKNYA", dalam *Jurnal Farmaka*, 30(10), 2020, hlm. 121. [https://doi.org/10.1007/978-90-313-6309-4\\_13](https://doi.org/10.1007/978-90-313-6309-4_13)

<sup>2</sup> A. Nugroho. *Perdagangan Opium Di Karesidenan Jepara Tahun 1870-1932*, (2018), hlm. 404–416.

<sup>3</sup> D. Trianasari. "PERDAGANGAN OPIUM DI SURAKARTA TAHUN 1899-1942", dalam *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 5(3), (2020), hlm. 248–253.

pedagang dari eropa lainnya untuk menguasai perdagangan di Jawa, hingga kemudian muncul perjanjian yang disetujui bersama oleh Raja Amangkurat II yang isinya Raja memberikan jaminan kepada VOC untuk mengimpor candu ke wilayah kekuasaan Mataram dan memonopoli untuk mengedarkannya dalam negeri. Berdasarkan catatan dari Rush (2000), setelah perjanjian ini disahkan, VOC hingga tahun 1799 membawa sejumlah rata-rata 56 ton opium ke wilayah Jawa setiap tahunnya (Ibrahim, 2016).<sup>4</sup>

Sedangkan Lasem pada masa Abad ke-17 telah dihuni oleh beberapa entitas ras yang ada didalamnya. Tak hanya mereka yang dari pribumi saja, melainkan Lasem menghasilkan citra multikultural dengan perpaduan antara masyarakat Arab dan Tionghoa didalamnya. Namun hanya ada dua ras yang paling mendominasi persebaran disana, yakni Tionghoa dan Jawa dengan Jawa sebagai mayoritasnya. Jika kita menakar lebih jauh terkait kedatangan orang Tionghoa ke Indonesia terkhusus pulau Jawa, mayoritas dari mereka melakukan pendaratan di kawasan pesisir utara. Sebagian besar dari mereka jika diidentifikasi merupakan orang-orang yang berasal dari provinsi *Fukien Fujian* dan *Kwang Tung* (Lestari & Wiratama, 2018).<sup>5</sup> Lasem tak luput dari lokasi awal kedatangan mereka sebab jika menengok secara geografis, Lasem berada di pesisir utara kabupaten Rembang, kawasan yang strategis jika digunakan sebagai pendaratan. Tak ayal jika sekarang, Lasem mendapatkan julukan sebagai “Tiongkok Kecil” atau “*la Petit Chinois*”.

Seiring dengan perkembangannya, populasi orang Tionghoa yang berada di Lasem semakin meluas. Hal ini terjadi dengan signifikan pada abad 18 sebagai bentuk adanya peristiwa Geger Pecinan yang menyebabkan banyak masyarakat Tionghoa di Jakarta mengalami perpindahan secara massal. Perpindahan tersebut secara otomatis membuat jumlah penduduk Tionghoa di Lasem menjadi semakin besar, bahkan sensus yang dilakukan semasa pemerintahan Raffles menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 4% penduduk semenjak terjadi mobilitas yang besar itu. Bahkan kawasan Lasem mencatatkan diri sebagai kawasan dengan jumlah penduduk etnis Tionghoa terbesar ke-4 pada tahun 1815.

---

<sup>4</sup> J. Ibrahim. “Candu Dan Militer Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan Dalam Perdagangan Candu Di Jawa Pada Masa Revolusi”, dalam *Jurnal Kawistara*, 6(1), (2016), hlm. 76. <https://doi.org/10.22146/kawistara.15495>

<sup>5</sup> S. Lestari & N. Wiratama. “DARI OPIUM HINGGA BATIK : LASEM DALAM “KUASA ” TIONGHOA ABAD XIX-XX”, dalam *Jurnal Patrawidya*, Vol. 19, (2018), hlm. 253–270.

Semakin bertambah banyaknya jumlah penduduk yang berada di kawasan Lasem terutama etnis Tionghoa, secara tidak langsung juga menambahkan orang-orang Tionghoa yang memang piawai dalam berdagang ikut mengambil peranannya di kawasan Lasem. Salah satunya adalah mereka-mereka yang ahli dalam berdagang opium atau candu. Menurut catatan Pratiwo dalam Peter Nas (2003), disebutkan bahwa masyarakat Tionghoa yang berdagang Candu berkembang pesat dan tumbuh menjadi masyarakat kelas atas hingga abad ke-19. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan rumah mewah nan megah, serta kapal-kapal guna menopang kegiatan perdagangan mereka.

Kemudian di akhir abad ke-19, peredaran candu di kawasan Jawa semakin meluas, dengan daerah-daerah di pesisir utara sebagai kawasan penerimanya, salah satunya adalah Lasem dengan tujuan ke daerah padat penduduk seperti Surakarta dan Yogyakarta yang saat itu berada dibawah kekuasaan dari Mataram.

Sementara itu, pemerintah belanda dalam memainkan peranannya sebagai pihak yang menguasai perdagangan opium pada masa itu menjalankan kebijakan yang disebut sebagai *opiumpacht*. *Opiumpacht* secara resmi baru ditetapkan pertama kali oleh Daendels pada tahun 1809 berupa bentuk struktur formalnya, meskipun keberadaan *opiumpacht* sendiri ditengarai telah ada sejak lama (Fathoni, 2020).<sup>6</sup> Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan ini, Daendels juga memiliki peran dalam menciptakan kondisi hidup baru dengan menerapkan pajak pendapatan terutama pajak pendapatan opium yang dinaungi langsung dan dikontrol penuh oleh pemerintah.

Peter Carey menyebutkan bahwa di awal abad ke-19, perdagangan candu telah ada di tempat-tempat yang berbeda sejumlah 372 tempat dengan lisensi resmi untuk menjual candu. Tempat dengan lisensi tersebut merupakan tempat pos bea cukai utama, sub-pos cukai, serta pasar yang beradai di kawasan Kasultanan dan Kasunanan (Carey, 1984).<sup>7</sup> Sejalan dengan kekuasaan yang semakin besar dari pemerintah Kolonial Belanda, maka semakin besar pula permintaan Candu yang berada di kawasan Jawa. Dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat, maka pemerintah pada masa itu memberikan izin terhadap pembukaan bandar

---

<sup>6</sup> A. Fathoni. *Dari Opiumpacht Hingga Opiumregie: Pasang Surut Perdagangan Opium di Keresidenan Kediri, 1833-1931*. (2020).

<sup>7</sup> P. Carey. *Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825*. (1984).

candu yang terdapat di kota besar Jawa. Kepemilikan izin bandar diperoleh dari lelang yang dihadiri dan dipimpin langsung oleh seorang residen. Seorang residen datang dalam pelelangan tersebut karena memiliki peranan untuk memastikan siapa yang nantinya berhak memenangkan lelang untuk selanjutnya diadakan pembahasan terkait besarnya pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh siapapun yang memenangkan lelang bandar opium (2016).<sup>8</sup>

Rush, dalam catatannya menjelaskan bahwa pemenang dari pemegang bandar opium ini biasanya adalah orang-orang etnis Tionghoa. Sebab biasanya, mereka memenangkan lelang dengan melakukan berbagai upaya, seperti menyuap, melakukan kerjasama atau kongsi dengan pedagang Cina lain, atau dengan cara mencari dukungan dari Residen atau pejabat yang memiliki peranan dalam lelang bandar tersebut. Kawasan-kawasan yang dikuasai bandar di wilayah Jawa berada di kawasan yang memiliki permukiman penduduk Cina yang besar, seperti Semarang, Batavia, Surakarta, dan Yogyakarta.

Seiring berjalannya waktu, praktik sistem *opiumpacht* ternyata malah menyebabkan berbagai masalah baru, diantaranya adalah seringnya terjadinya pertarungan, penyelundupan opium antar wilayah, yang mana justru merugikan pihak pemerintah kolonial. Hingga akhirnya pada tahun 1894, pemerintah kolonial mulai menerapkan sistem baru yakni *opiumregie* (Sari, 2022).<sup>9</sup>

*Opiumregie* dalam pelaksanaannya diuji cobakan pertama kali di wilayah Madura pada tahun 1894, yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan di Jawa. Penerapan kebijakan ini diketahui cukup menguntungkan pihak kolonial dengan menjadikan mereka sebagai satu-satunya lembaga yang mengimpor, mengolah dan menjual opium eceran kepada pembeli. Sedangkan daerah untuk pengimporan opium dipilih dari kawasan Asia Selatan seperti India serta Eropa (Turki) yang kemudian disimpan di gudang di wilayah Batavia yang kemudian diolah untuk didistribusikan ke berbagai wilayah karesidenan yang telah memiliki izin tempat penjualan (2020).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> J. Ibrahim, 2016, hlm. 78.

<sup>9</sup> S. Sari. "CANDU DI MADURA TAHUN 1894-1949", dalam *Jurnal Avatara*, 13(1), (2022), hlm 1–18.

<sup>10</sup> A. Fathoni, 2020.

Tujuan pembentukan *opiumregie* ini secara substansial sebenarnya sejalan dengan diterapkannya *opiumpacht* yakni dengan melakukan pengawasan secara langsung terhadap penjualan opium secara ilegal, yang nantinya dengan menurunnya penjualan secara ilegal dapat memberikan keuntungan besar terhadap pemerintah Kolonial dari aktivitas monopoli perdagangan opium secara resmi untuk masyarakat. Nantinya, pengadaan opium legal dilakukan lewat pegawai milik pemerintah yang mereka gaji perbulannya.

Nantinya, pelaksanaan *opiumregie* akan diberikan perhatian khusus kepada ketersediaan opium kepada para pelanggan yang menjangkau seluruh kawasan pemasaran mereka. Jenis opium yang mereka jual pun terbagi menjadi dua jenis, yakni *regie-opium* dan *tike-opium (djidjing)* dari wilayah Batavia yang kemudian disalurkan lewat pegawai mereka hingga sampai ke wilayah-wilayah Jawa lainnya. Hingga nantinya pemerintah Kolonial Belanda mendapatkan upah besar dari penjualan opium selama ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Heuristik atau pengumpulan data merupakan tahapan untuk mencari bahan atau mengumpulkan sumber literatur bacaan sejarah. Menurut Laksono (2018)<sup>11</sup>, heuristik merupakan tahapan mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber dengan berbagai cara dalam berbagai bentuk guna mengetahui segala peristiwa atau terjadi masa lalu yang relevan dengan penelitian. Pada tahap heuristik ini peneliti melakukan pencarian sumber sejarah yang berkaitan dengan perdagangan opium di Nusantara khususnya dibawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sumber yang digunakan peneliti dalam mendukung penelitian ini dengan menggunakan studi literatur berupa buku serta jurnal pendukung yang banyak ditemukan di berbagai situs internet.

Setelah melakukan pengumpulan sumber sejarah kemudian peneliti melakukan pengujian terhadap data yang telah dikumpulkan guna menghindari keraguan terhadap keabsahan data. Tahap ini disebut dengan tahap kritik sumber, selain itu menurut Sjamsudin

---

<sup>11</sup> Anton Dwi Laksono. *Apa Itu Sejarah: Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian*. (Pontianak: Derwati Press, 2018).

dalam Saputra (2022)<sup>12</sup> menjelaskan bahwa kritik sumber bertujuan untuk mencegah sejarawan dalam melakukan kesalahan dalam penelitian sejarah serta guna membedakan sumber sejarah asli atau palsu sehingga karya sejarah menjadi sebuah hasil proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah tahap kritik sumber selesai dilakukan, maka akan menjadi sebuah fakta sejarah yang sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan tahapan kritik sumber dan analisis yang lebih dalam lagi. Tahapan ini yang kemudian dikenal dengan interpretasi. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta sejarah setelah ditemukan setelah kita melakukan kritik sumber. Pada tahap ini peneliti diharapkan dapat melakukan penafsiran terhadap data dan fakta serta mencari makna dan keterkaitannya antara fakta yang satu dengan fakta lainnya yang pada akhirnya menciptakan sebuah rekonstruksi fakta sejarah.

Pada tahap akhir yaitu historiografi, peneliti telah sampai di tahap menuliskan rangkaian penelitian yang telah dilakukan serta memunculkan fakta dan makna suatu peristiwa secara sistematis hingga menjadi suatu tulisan sejarah, seperti tulisan “Lasem: Napak Tilas Perdagangan Opium Nusantara”.

## **PEMBAHASAN**

### **Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lasem**

Lasem di era sekarang, merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Namun dulunya, Lasem merupakan daerah berdirinya kerajaan kecil yang berada dibawah naungan kerajaan Majapahit. Selain akrab dengan julukan “Kota Santri” yang disebabkan oleh banyaknya jumlah pondok pesantren di kawasan Lasem, daerah ini lebih dahulu akrab dengan julukan “*la petit chinois*” atau “Tionggok Kecil”, sebab banyaknya pemukiman penduduk dengan berarsitektur Tionghoa sebagai bukti sejarah keberadaan masyarakat Tionghoa pada abad 17 sampai abad ke-21 (Nurhajarini et al., 2015).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Saputra. “PERKEMBANGAN TREM BATAVIA 1869-1930”. 13(1), (2022), hlm. 74–92.

<sup>13</sup> D. R. Nurhajarini, E. Purwaningsih, & I. Fibiona. *Akulturası Lintas Zaman di Lasem: Perspektif Sejarah dan Budaya (Kurun Niaga-Sekarang)* , (2015). <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/1131>.

Keberadaan etnis Tionghoa di daerah Lasem diketahui telah ada semenjak abad ke 13-14 dengan dituliskannya catatan dalam Kitab Badra Santi yang menjelaskan bahwa terdapat seseorang yang berasal dari negeri Campa atau daerah di Indocina yakni Bi Nang Un dengan membawa istrinya yang berasal dari daerah Cina yaitu Puteri Na Li Ni. Semenjak itu, Lasem sempat beberapa kali mengalami pergantian kekuasaan. Dimana kerajaan Majapahit yang beragama Hindu Buddha yang menjadi pemegang kekuasaan awal, kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Islam dibawah Kerajaan Demak, yang disusul oleh kedatangan orang-orang Tiongkok dari Batavia pasca terjadi Tragedi Angke pada abad ke-18.

Sedikit melakukan kilas balik kedatangan masyarakat Tionghoa dalam jumlah besar yang berawal dari terjadinya peristiwa Angke, perlu diketahui juga bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang menjadi catatan kelam sejarah masyarakat Tiongkok di Jawa. Tepatnya pada tahun 1740, dimana terjadi tragedi pembantaian masyarakat etnis Tionghoa di Batavia oleh masyarakat pribumi serta pemerintah Kolonial. Masyarakat pada masa itu melakukan tindakan ini sebab diinisiasi oleh Belanda dengan adanya distribusi senjata kepada masyarakat kelas bawah dan kemudian mereka dipersilahkan untuk melakukan kekerasan yang berujung pembantaian etnis Tionghoa. Sontak saja hal ini membuat Batavia menjadi kacau, dan tercatat pada peristiwa yang berawal pada tanggal 22 Oktober 1740 itu menimbulkan korban jiwa sebanyak 10.000 orang.

Banyak diantara mereka yang selamat dari peristiwa itu kabur ke arah Timur di pinggiran kota Batavia dan menyelamatkan diri ke beberapa daerah lain, yang mana salah satunya adalah Lasem. Masyarakat Tionghoa yang kabur dari peristiwa yang dikenal dengan sebutan “Geger Pecinan” itu meninggalkan unsur ke-Tionghoan yang sebelumnya mereka anut dan berubah semenjak peristiwa tersebut dengan melebur menjadi masyarakat Jawa dan ada beberapa dari mereka yang masuk Islam guna menghindari regresi serta melakukan perlawanan terhadap Belanda (Setiono dalam Nurhajarini et al., 2015).<sup>14</sup>

Pasca terjadi peristiwa “Geger Pecinan” yang menggemparkan tersebut, kemudian muncul pula perlawanan-perlawanan lokal yang di kemudian hari dapat ditumpaskan oleh pemerintah kolonial. Alhasil, Lasem pada masa itu mengalami penurunan status sebagai kecamatan seiring berkembangnya menjadi pemukiman Tionghoa yang kabur pasca pembantaian di Batavia dan munculnya berbagai perlawanan di sana.

---

<sup>14</sup> D. R. Nurhajarini, 2015.



Seiring berkembangnya waktu, masyarakat Lasem yang didominasi oleh etnis Tionghoa itupun berkembang menjadi kawasan yang dapat dikatakan terpadang sebab adanya keterampilan mereka dalam menjalankan perekonomian, khususnya perdagangan. Perkembangan itupun akhirnya dilirik oleh VOC dengan nada kecemburuan yang disebabkan beberapa kali masyarakat Tionghoa menang dalam kontestasi perdagangan dengan masyarakat bebas atau pemerintah Belanda tak dapat menandinginya, sehingga muncul kecemburuan yang didasarkan pada sikap rasial.

Alhasil pada tahun 1835, pemerintah kolonial pada saat itu menjalankan regulasi yang cukup ketat bagi masyarakat Tionghoa yang dikenal dengan *wijkenstelsel*. Kebijakan ini adalah sebuah cara atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan melakukan isolasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa dalam upaya pembauran terhadap masyarakat pribumi setempat. Sehingga, muara dari kebijakan ini adalah timbulnya sentimen dari masyarakat dengan menganggap masyarakat etnis Tionghoa adalah masyarakat yang eksklusif.

Hal ini menjadi semakin terdorong dengan adanya bukti bahwa masyarakat Tionghoa memiliki kemampuan dalam berdagang lebih baik jika dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Keahlian dalam perdagangan tersebut yang kemudian menjadikan mereka tumbuh menjadi masyarakat kaya atau kelas menengah keatas. Alhasil timbul kesenjangan sosial sebagai bentuk keadaan tersebut.

### **Perdagangan Opium di Kawasan Lasem**

Secara geografis, daerah Lasem memang dapat digolongkan menjadi area yang strategis bagi bangsa pendatang yang memang memiliki basic pada hal perdagangan. Adanya sungai yang disebut-sebut sebagai urat nadinya daerah Lasem menjadi salah satu faktor pendorong kejayaan masyarakat pada abad 18-19 sebelum dibangunnya *grote postweg* atau jalan raya pos. Sungai inilah yang memiliki peranan dalam menghubungkan daerah pedalaman dengan daerah pesisir. Disana, terdapat sebuah pelabuhan yang digunakan sebagai tempat keluar masuknya barang ataupun orang entah dari Lasem itu sendiri atau dari pulau atau daerah lain. Di pelabuhan tersebut juga menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal pedagang untuk beristirahat dalam beberapa waktu.

Salah satu komoditas yang menjadi sesuatu yang diperhitungkan pada masa itu adalah opium. Selama masa perdagangan opium tersebut, muncul kebijakan dari pemerintah terkait

monopoli perdagangan candu atau opium dengan menjalankan sistem yang dikenal dengan sebutan *opiumpacht*. Sistem ini dijalankan secara resmi pertama kali oleh Daendels pada tahun 1809 berupa bentuk struktur formalnya. Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan ini, Daendels juga memiliki peran dalam menciptakan kondisi hidup baru dengan menerapkan pajak pendapatan terutama pajak pendapatan opium yang dinaungi langsung dan dikontrol penuh oleh pemerintah. Cara kerja dari sistem *opiumpacht* ini adalah dengan melakukan monopoli penjualan kepada penduduk melalui pedagang perantara. Pemerintah melakukan suplai opium yang diberikan kepada kepala bandar yang sering dikenal dengan sebutan “*hoofd pachter*” lalu didistribusikan kepada sub bandar atau *onder pachter* yang kemudian akan diberikan kepada konsumen (Nurkholis, 2022).<sup>15</sup>

Sistem ini dikemudian waktu diketahui menjadi ladang dari masyarakat Tionghoa untuk mencari cuan dengan terjun menjadi kepala bandar di Jawa dengan menjadi bandar yang paling royal dalam transaksi opium. Di sebagian besar wilayah di pulau Jawa, Opium menjadi barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Hal ini karena Jawa pada masa itu yang mayoritas masyarakatnya memiliki anggapan bahwa barang ini merupakan barang yang tidak halal dan merugikan masyarakat, sehingga beberapa kawasan diantaranya melarang adanya transaksi opium. Namun tentu saja dari beberapa wilayah yang melarang tersebut tetap saja ada beberapa kawasan yang memiliki pasar gelap transaksi jual beli opium dan beberapa juga terdapat tempat legal dalam penjualan, tak terkecuali di daerah Lasem.

Opium kala itu menjadi komoditi emas atau dapat disebut menjadi sumber pendapatan penting bagi suatu wilayah atau kerajaan, khususnya pada kerajaan yang hampir mencapai masa akhir kekuasaannya. Sebagai contoh adalah Sultan Lingga yang ikut memegang peranan menjadi bandar di akhir abad 19 berhasil mendapatkan setengah pendapatan langsung kerajaan yang didapatkan dari pasokan opium. Sehingga dapat diketahui bahwa opium menjadi sumber penting yang digunakan baik itu penguasa lokal atau pemerintah kolonial untuk mendapatkan sumber pundi-pundi penghasilan, sehingga hal inilah yang mendasari terjadinya monopoli terhadap perdagangan impor opium.

---

<sup>15</sup> D. Nurkholis. “Dinamika Perdagangan Opium di Surakarta Tahun 1886-1928”, dalam *Skripsi*, UNS, (2022).

Sebenarnya, opium pada masa pemerintahan Belanda bukanlah menjadi satu-satunya komoditas impor. Menilik pada catatan dari (Salsabila et al., 2022)<sup>16</sup> disebutkan bahwa barang-barang impor yang diangkut semasa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dengan menggunakan kapal dengan rute akhir adalah pelabuhan di berbagai daerah, diantaranya adalah kain, minyak, besi atau barang lain yang berbahan besi, senjata, lilin, miras dan berbagai barang lainnya termasuk opium. Delden dalam Salsabila (2022)<sup>17</sup> menyebut bahwa opium yang terdapat di Hindia Belanda berasal dari beberapa daerah, diantaranya adalah India, Persia, Turki, dan Singapura.

Kembali di daerah Lasem, adanya sistem yang ketat dari pemerintah kolonial terhadap pengadaan opium, serta melambungnya harga opium di Hindia-Belanda pada masa itu jika dibanding dengan negara sebelah seperti Singapura, membuat aktivitas transaksi jual beli opium dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Opium ilegal didaratkan di kawasan pesisir pantai utara. Sementara di wilayah lain seperti Batavia, mereka mendistribusikan ke wilayah pedalaman sekitarnya serta Banten dan Priangan secara mandiri. Serta kawasan Kediri mendapat suplai opium secara gelap dari Surabaya. Mereka terhubung melalui rute sungai Madiun dan Surakarta. Jika berkaca pada catatan Rush dalam Lestari (2018)<sup>18</sup>, disebutkan bahwa jumlah perdagangan opium gelap di daerah kawasan pantai selatan tak mendapat suplai yang besar. Hal ini berbanding terbalik dengan di kawasan pesisir utara Jawa dimana di daerah Jepara, Juwana, Rembang hingga Lasem tercatat sebagai daerah yang mendapati jumlah opium dalam jumlah besar.

Sejalan dengan catatan dari Rush tersebut, terdapat bukti di daerah Lasem yang kini menjadi kawasan wisata yang di masa kini dikenal dengan tempat “Lawang Ombo”. Daerah ini diketahui sebagai tempat penyelundupan opium ilegal pada masa kolonial sebab untuk menghindari monopoli perdagangan yang dilakukan pemerintah dengan membuat tempat yang didalamnya terdapat sebuah sumur yang memiliki fungsi tidak seperti sumur pada umumnya. Jika kita tahu bahwa sumur biasanya merupakan tempat untuk menyimpan air, namun di bangunan yang sekarang dikenal dengan “Lawang Ombo” ini dulunya sumur

---

<sup>16</sup> R. Salsabila, A. N. Widiadi, & G. T. Leksana. “Dari Impor Hingga Ke Tangan Konsumen: Perdagangan Opium di Karesidenan Surabaya, 1870-1898”, dalam *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 6(1) , (2022) 111–127. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.5349>

<sup>17</sup> R. Salsabila, 2022.

<sup>18</sup> S. Lestari, 2018.

tersebut digunakan sebagai tempat untuk transaksi opium ilegal. Memang jika dilihat bentuknya seperti sumur pada umumnya, namun yang perlu diketahui sumur tersebut terhubung langsung dibawahnya dengan Sungai Babagan yang ada di seberangnya. Nantinya kapal yang mengangkut opium tersebut berhenti tepat dibawah untuk melakukan transaksi perdagangannya.

Sebelum dikenal sebagai kawasan penyelundup opium, Lasem ini dulunya terkenal akan kejayaannya dalam berlayar. Orang-orang Lasem merupakan orang yang ahli dalam membuat kapal, keterampilan tersebut dipadukan dengan keahlian mereka dalam berdagang yang pada akhirnya menjadi cikal bakal kejayaan masyarakat Lasem. Namun berkembangnya waktu tidak selalu membuat mereka berada di atas, masyarakat pada masa itu yang tergolong sebagai nelayan, saudagar pemilik kapal, atau siapapun yang berkaitan dengan kegiatan pelayaran dan nelayan pada masa gelap tersebut memikirkan untuk memperbaiki nasib mereka dengan cara yang berbeda. Kebanyakan dari mereka beralih profesi untuk bergabung kedalam penyelundupan barang. Sehingga pada akhir abad ke 19, keberhasilan orang-orang tersebut dalam melakukan penyelundupan opium membuat kawasan Juwana hingga Lasem memperoleh julukan sebagai “corong opium” Jawa (Lestari & Wiratama, 2018).<sup>19</sup>

Adapun keberhasilan yang didapati oleh masyarakat Lasem tak bertahan lama, sebab adanya berita-berita terkait penyelundupan tersebut pada akhirnya justru yang menjadi cikal bakal meredupnya bisnis tersebut di area Lasem, tak hanya Lasem sebab seluruh area Jawa juga ikut meredup. Hal ini disebabkan oleh runtuhnya kongsi besar pak opium yang dibarengi dengan serangan terhadap pak opium yang diinisiasi oleh para misionaris, jurnalis, pegawai Hindia Belanda, serta politisi bersama dewan kolonial. Dengan adanya ide tersebut maka satu persatu kegiatan penyelundupan di kawasan Jawa mulai diberantas, hal ini juga terjadi di daerah Lasem. Salah satu kasus penyelundupan yang besar dan tertangkap adalah kasus penyelundupan di Pempirak yang berhasil menggagalkan penyelundupan 30-40 kilogram opium. Selain itu, terdapat dua kasus besar lain yang menunjukkan keberhasilan tim penangkal penyelundupan opium. Kasus pertama adalah penyelundupan ke wilayah Lasem yang berhasil digagalkan oleh petugas-*tjandoe* dengan jumlah barang sebesar sepuluh *katies* yang jika dihitung beratnya hampir 1 ton, tentu saja ini adalah jumlah yang besar. Kasus

---

<sup>19</sup> S. Lestari, 2018.

yang kedua adalah terungkapnya kasus penyelundupan yang dilakukan beberapa hari setelah ditemukannya kasus pertama dengan besaran berat yang lebih besar jika dibanding sebelumnya, yakni dua puluh *katies* atau hampir setara dengan 2 ton. Jumlah ini jika dibandingkan dengan wilayah lainnya tergolong sebagai jumlah penyelundupan yang tergolong pada skala besar.

Selain keberhasilan pada dua kasus tadi, banyak terungkap pula upaya-upaya penyelundupan lain yang menggunakan metode berbeda dengan tidak menggunakan rute sungai babagan. Bahkan tak hanya petugas yang menjumpai penyelundupan opium tersebut, melainkan petani pun sempat beberapa kali menjumpai ladangnya digunakan sebagai area menaruh barang tersebut. Akhirnya guna memberantas hal tersebut, pemerintah mengumumkan sayembara guna siapa saja yang dapat menangkap kasus penyelundupan opium mendapat imbalan, sesuai yang termuat dalam berita *Soerabaijasch Handelsblad*, 7 April 1903.

Jika melihat dari upaya besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas upaya penyelundupan opium ilegal di berbagai wilayah Jawa tanpa terkecuali Lasem, maka hal itu banyak membuat bandar-bandar tersebut menjadi gulung tikar dan beralih profesi. Alih bisnis yang dilakukan dengan meninggalkan opium adalah dengan melihat pada bisnis lain yang dilihat cukup menggiurkan dan sesuai dengan latar belakang keahlian masyarakat Tionghoa, yakni bisnis batik. Alhasil peralihan tersebut membuahkan hasil dengan menunjukkan catatan hingga masa kini kawasan Lasem terkenal akan kerajinan batiknya.

### **Dampak Perdagangan Opium di Lasem**

Bisnis perdagangan opium di daerah Jawa khususnya Lasem telah memberikan dampak yang besar. Kawasan Lasem yang secara geografis berada di kawasan pesisir utara menjadikan daerah ini sebagai ladang yang cukup strategis dalam bisnis jual beli opium. Hal ini menjadikan daerah Lasem sebagai daerah yang di masa itu terkenal sebagai daerah yang mudah untuk mendapati candu, sejalan dengan ini angka pengguna candu pun semakin meningkat setiap waktunya. Tak hanya dibeli oleh masyarakat kelas atas saja, candu sudah menjadi konsumsi bagi masyarakat berbagai golongan tanpa terkecuali.

Jika meruntut secara kronologis tentang keberadaan candu di Jawa memang konsumen utama candu pada masa itu adalah mereka yang tergabung dalam golongan bangsawan. Mereka pada masa tersebut menjadikan opium sebagai konsumsi untuk gaya hidup serta

digunakan sebagai barang kehormatan untuk diberikan kepada tamu. Namun barulah di abad ke-19 konsumen opium mulai meluas lagi dengan adanya kebijakan dari pemerintah kolonial untuk menyebarluaskan perdagangan opium yang menguntungkan dengan memegang para stakeholder atau pemegang kekuasaan atau seseorang yang memiliki pengaruh di setiap daerahnya. Mereka menjadi bandar yang keuntungannya dapat mereka manfaatkan secara pribadi, serta bagi buruh yang menjadi pengedar opium mendapatkan upah berupa uang tunai. Tentu saja hal ini menjadikan peredaran opium di Jawa semakin meluas dan menjadi lebih masif.

Namun, masifnya peredaran opium tersebut tak dibarengi pula oleh sikap dan perilaku positif masyarakat yang mengkonsumsinya. Sebab seperti yang kita tahu, bahwa opium ini merupakan salah satu jenis narkotika yang termasuk kedalam golongan 1. Yang berarti hal ini memberikan efek rasa ketergantungan untuk terus mengonsumsi barang tersebut. Semakin tingginya angka konsumsi masyarakat, tentu saja angka kebutuhan barang semakin meningkat. Kedua aspek tersebut tak dibarengi dengan meningkatnya tingkat perekonomian mayoritas masyarakat yang menjadi konsumen candu tersebut. Hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya tingkat kriminalitas yang terjadi di berbagai daerah tak terkecuali Lasem. Beragam tindak kriminal tersebut diantaranya adalah pencurian, perkelahian, serta prostitusi. Pencurian menjadi salah satu tindakan yang paling banyak terjadi.

Ketika menginjak pada abad ke-19, mulai terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kemerosotan industri perkebunan secara tak langsung membuat bisnis opium pun ikut tersendat. Memang pada awalnya kemerosotan ekonomi tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap angka penjualan opium namun di akhir abad 19 disebutkan bahwa mulai banyak bandar opium yang diserang kerugian yang berujung pada gulung tikar di tahun 1887. Selanjutnya di tahun 1890, pak pak opium yang ada di Jawa terdapat pembatasan oleh pemerintah kolonial dengan hanya berada dalam jumlah 1000 toko saja.

Dengan semakin amblasnya tingkat perekonomian masyarakat pada abad ke-20, serta daya beli masyarakat yang menurun secara drastis dengan ditambah semakin tingginya angka pengangguran, semakin membuat konsumen opium beralih menjadi konsumen opium gelap. Bahkan beberapa diantara mereka memilih untuk tidak membeli opium sebab memang mereka tak mampu untuk membeli. Alhasil pemerintah memberikan respon dari peristiwa tersebut dengan memberikan pemotongan harga pada penjualan opium pada tahun

1936. Namun upaya tersebut dapat dikatakan terlambat, dan hal tersebut yang mendasari semakin redupnya bisnis penjualan opium di Jawa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa perdagangan opium di kawasan Jawa mulai tersebar semenjak didapatkannya persetujuan yang mengikat antara raja Amangkurat II dengan pihak Belanda yang pada masa itu dipimpin oleh VOC untuk melakukan monopoli perdagangan opium ke wilayah kekuasaan Mataram yang hampir menjangkau seluruh pulau Jawa pada masa itu. Sejatinya di masa awal, keberadaan opium tak hanya melulu dijual sebagai barang konsumsi masyarakat. Melainkan digunakan sebagai alternatif pengobatan, sebab opium dianggap dapat memberikan pengurangan rasa sakit atau meredakan rasa sakit jika dikonsumsi menggunakan petunjuk yang diberikan dokter. Namun berkembangnya waktu dengan didorong oleh kepentingan bisnis semakin membuat keberadaan opium tak lagi hanya dibutuhkan sebagai konsumsi medis saja. Adanya efek samping yang memberikan efek kesenangan berlebih membuat masyarakat gemar untuk mengkonsumsi barang yang tergolong sebagai narkotika golongan I ini.

Pada awalnya, tak sembarang orang yang dapat mengkonsumsi ini, hanya mereka yang berada pada golongan bangsawan saja yang mengkonsumsi opium, baik untuk kepentingan pribadi atau sebagai perjamuan tamu yang datang ke istana. Barulah pada abad ke-19 konsumen opium mulai meluas lagi dengan adanya kebijakan dari pemerintah kolonial untuk menyebarluaskan perdagangan opium yang menguntungkan dengan memegang para stakeholder atau pemegang kekuasaan atau seseorang yang memiliki pengaruh di setiap daerahnya. Mereka menjadi bandar yang keuntungannya dapat mereka manfaatkan secara pribadi, serta bagi burh yang menjadi pengedar opium mendapatkan upah berupa uang tunai. Tentu saja hal ini menjadikan peredaran opium di Jawa semakin meluas dan menjadi lebih masif. Tak terkecuali di wilayah pesisir utara Jawa pada masa itu, yaitu wilayah Lasem. Kawasan ini menjadi salah satu titik penyebaran opium yang kemudian berhenti di dermaga pelabuhan untuk selanjutnya didistribusikan di wilayah permukiman padat penduduk, biasanya adalah di kawasan Surakarta dan Yogyakarta. Selain itu, pengaruh dari datangnya perpindahan penduduk masyarakat Tionghoa dalam jumlah besar sebagai efek dari terjadinya peristiwa “geger pecinan” turut serta membuat kawasan Lasem menjadi daerah

yang piawai dalam berdagang dan dikuasai oleh mayoritas etnis Tionghoa. Salah satu komoditas perdagangan yang diperjualbelikan pada masa itu adalah opium.

Adanya kebijakan monopoli perdagangan dari pemerintah kolonial membuat para bandar opium di berbagai kawasan di pulau Jawa tak terkecuali Lasem mulai memikirkan cara untuk mendapat keuntungan lebih, hal ini dilakukan dengan menjadikan kawasan mereka sebagai tempat distribusi gelap opium (ilegal). Aktivitas transaksi jual beli opium pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Opium ilegal didaratkan di kawasan pesisir pantai utara. Disebutkan bahwa jumlah perdagangan opium gelap di daerah kawasan pantai selatan tak mendapat suplai yang besar. Hal ini berbanding terbalik dengan di kawasan pesisir utara Jawa dimana di daerah Jepara, Juwana, Rembang hingga Lasem tercatat sebagai daerah yang mendapat jumlah opium dalam jumlah besar. Keberhasilan masyarakat Lasem dalam menjadi penyelundup tak luput dari adanya peralihan profesi sebagian besar masyarakatnya. Kebanyakan dari mereka beralih profesi dari yang semula nelayan atau memiliki peranan dalam kegiatan pelayaran kemudian bergabung kedalam penyelundupan barang. Sehingga pada akhir abad ke 19, keberhasilan orang-orang tersebut dalam melakukan penyelundupan opium membuat kawasan Juwana hingga Lasem memperoleh julukan sebagai “corong opium” Jawa.

Namun perkembangan opium tersebut tak selalu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Sebab lain yang memberikan dampak baik bagi pemerintahan untuk memperoleh pendapatan tinggi bagi kas negara, juga berdampak buruk terhadap masyarakat pun terjadi sebagai bentuk meluasnya transaksi perdagangan opium di Jawa khususnya Lasem. Bagi mereka yang menjadi konsumen candu tersebut mereka akan terkena efek ketergantungan, sehingga mereka akan melakukan upaya apa saja untuk mendapatkan barang tersebut secara terus menerus. Pola ini terus terjadi, sehingga seiring berjalannya waktu membuat tingkat kriminalitas semakin meningkat. Beragam tindak kriminal tersebut diantaranya adalah pencurian, perkelahian, serta prostitusi. Pencurian menjadi salah satu tindakan yang paling banyak terjadi.

## **REFERENSI**

Annisa, A., Heri, P., & Subarnas, A. (2020). MORFIN : PENGGUNAAN KLINIS DAN ASPEK-ASPEKNYA. *Jurnal Farmaka*, 30(10), 121. [https://doi.org/10.1007/978-90-313-6309-4\\_13](https://doi.org/10.1007/978-90-313-6309-4_13)



- Carey, P. (1984). Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825. *East*.
- Fathoni, A. (2020). *Dari Opiumpacht Hingga Opiumregie: Pasang Surut Perdagangan Opium di Keresidenan Kediri, 1833-1931*.
- Ibrahim, J. (2016). Candu Dan Militer Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan Dalam Perdagangan Candu Di Jawa Pada Masa Revolusi. *Jurnal Kawistara*, 6(1), 76.  
<https://doi.org/10.22146/kawistara.15495>
- Laksono, Anton Dwi. 2018. *Apa Itu Sejarah: Pengertian, Ruang Lingkup, Metode dan Penelitian*. Pontianak: Derwati Press.
- Lestari, S., & Wiratama, N. (2018). DARI OPIUM HINGGA BATIK : LASEM DALAM “ KUASA ” TIONGHOA ABAD XIX-XX. *Jurnal Patrawidya*, 19, 253–270.
- Nugroho, A. (2018). *Perdagangan Opium Di Karesidenan Jepara Tahun 1870-1932*. 404–416.
- Nurhajarini, D. R., Purwaningsih, E., & Fibiona, I. (2015). *Akulturası Lintas Zaman di Lasem: Perspektif Sejarah dan Budaya (Kurun Niaga-Sekarang)*.  
<http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/1131>
- Nurkholis, D. (2022). *Dinamika Perdagangan Opium di Surakarta Tahun 1886-1928*. UNS.
- Salsabila, R., Widiadi, A. N., & T. Leksana, G. (2022). Dari Impor Hingga Ke Tangan Konsumen: Perdagangan Opium di Karesidenan Surabaya, 1870-1898. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 6(1), 111–127.  
<https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.5349>
- Saputra, M. (2022). *PERKEMBANGAN TREM BATAVIA 1869-1930*. 13(1), 74–92.
- Sari, S. (2022). CANDU DI MADURA TAHUN 1894-1949. *Jurnal Avatara*, 13(1), 1–18.
- Trianasari, D. (2020). PERDAGANGAN OPIUM DI SURAKARTA TAHUN 1899-1942. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 5(3), 248–253.